

## PERAN ETIKA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Sri Rahmawati<sup>1</sup>, Dhea Nowanda<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email : [srirahma045@gmail.com](mailto:srirahma045@gmail.com)<sup>1</sup>, [nowandadhea@gmail.com](mailto:nowandadhea@gmail.com)<sup>2</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>Ethics in good governance has become a crucial issue determining the effectiveness of modern governance. This research aims to analyze the fundamental role of ethics in realizing good governance, identify implementation challenges, and formulate strengthening strategies. Using qualitative research methods with a library research approach, this study examines various current literature sources on ethics and good governance. The results show that ethics plays an important role in strengthening the pillars of good governance, including transparency, accountability, participation, and rule of law. The challenges of implementing ethics include internal aspects such as organizational culture and human resource capacity, as well as external aspects such as technological developments and socio-political dynamics. The strategy for strengthening ethics requires a comprehensive approach that includes system and regulatory development, apparatus capacity building, strengthening supervision, and empowering public participation. This research provides theoretical and practical contributions to the development of an ethical implementation framework in good governance.</i>
Nomor : 1	
Bulan : Januari	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

**Keywords :** Government Ethics, Good Governance, Public Governance

### Abstrak

Etika dalam good governance menjadi isu krusial yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fundamental etika dalam mewujudkan good governance, mengidentifikasi tantangan implementasinya, serta merumuskan strategi penguatannya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai sumber literatur terkini tentang etika dan good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika berperan penting dalam memperkuat pilar-pilar good governance, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan rule of law. Tantangan implementasi etika mencakup aspek internal seperti budaya organisasi dan kapasitas SDM, serta aspek eksternal seperti perkembangan teknologi dan dinamika sosial politik. Strategi penguatan etika memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi pengembangan sistem dan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan pengawasan, dan pemberdayaan partisipasi publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kerangka implementasi etika dalam good governance.

**Kata Kunci :** Etika Pemerintahan, Good Governance, Tata Kelola Publik

## **A. PENDAHULUAN**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi tuntutan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di era modern. Dalam konteks Indonesia, implementasi *good governance* masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama berkaitan dengan aspek etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan data Transparency International tahun 2023, Indonesia masih menduduki peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang mengindikasikan masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip etika dalam tata kelola pemerintahan (Wahyu, 2024).

Fenomena ini mencerminkan urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran fundamental etika dalam mewujudkan *good governance* yang berkelanjutan dan akuntabel. Permasalahan etika dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas pada isu korupsi, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya integritas aparatur pemerintah. Menurut penelitian (Pambudi, 2023), sekitar 65% kasus maladministrasi yang dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2021 berkaitan dengan pelanggaran etika pelayanan publik.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip etika dalam penyelenggaraan pemerintahan masih belum optimal dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Perkembangan teknologi dan kompleksitas permasalahan publik di era digital juga membawa tantangan baru dalam penerapan etika *good governance*. Studi yang dilakukan oleh (Nurnovianti & Karniawati, 2024) mengungkapkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik memunculkan dilema etis baru terkait privasi data, transparansi informasi, dan akuntabilitas digital. Hal ini semakin menegaskan pentingnya membangun kerangka etika yang komprehensif dan adaptif dalam konteks *good governance* kontemporer.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi beberapa rumusan masalah kritis, yaitu: (1) Bagaimana peran fundamental etika dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia? (2) Apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi etika *good governance* di era digital? (3) Bagaimana strategi penguatan etika dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif hubungan antara etika dan *good governance*, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi etika dalam tata kelola pemerintahan, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan dimensi etika

dalam mewujudkan good governance yang berkelanjutan. (Ramadhan et al., 2024) dalam penelitiannya menekankan bahwa pemahaman mendalam tentang peran etika menjadi fundamental dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan kerangka teoretis dan praktis dalam implementasi etika good governance. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang hubungan antara etika dan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam konteks Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan (Rahmarta et al., 2024) yang menggarisbawahi pentingnya pengembangan model etika good governance yang kontekstual dengan karakteristik dan tantangan lokal. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan etika di sektor publik. Sebagaimana diungkapkan oleh (Aushap et al., 2023), implementasi etika yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pelayanan pemerintah. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dalam menginternalisasi nilai-nilai etika dalam praktik tata kelola sehari-hari.

Lebih lanjut, urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat tantangan kompleks yang dihadapi dalam implementasi good governance di era digital. (Nastia, 2024) menyoroti bahwa transformasi digital pemerintahan memerlukan adaptasi kerangka etika yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan ekspektasi publik yang dinamis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dan mengatasi tantangan tersebut. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penelitian ini juga berkontribusi pada upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait dengan penguatan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Pemahaman mendalam tentang peran etika dalam good governance menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sebagaimana ditekankan dalam berbagai kajian terkini tentang reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur dan dokumen terkait peran etika dalam mewujudkan good governance. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara komprehensif konsep, teori, dan implementasi etika dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik melalui kajian literatur yang sistematis dan

terstruktur. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, publikasi lembaga internasional, dan sumber-sumber kredibel lainnya. Untuk menjamin kualitas dan relevansi data, peneliti menerapkan kriteria seleksi yang ketat, dengan prioritas pada sumber-sumber yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), kecuali untuk beberapa literatur fundamental yang memiliki nilai historis dan teoretis yang signifikan.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis konten (content analysis) yang dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi dan kategorisasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber literatur. Selanjutnya, dilakukan coding dan pengorganisasian data berdasarkan kategori-kategori yang telah ditetapkan, meliputi aspek konseptual etika dalam good governance, implementasi praktis, tantangan dan hambatan, serta strategi penguatan etika dalam tata kelola pemerintahan. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, diterapkan teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan obyektif tentang topik yang diteliti. Selain itu, peneliti juga melakukan peer review dengan melibatkan peneliti lain yang memiliki expertise dalam bidang administrasi publik dan etika pemerintahan untuk memberikan masukan dan validasi terhadap temuan penelitian.

Dalam rangka menjamin validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti mengembangkan protokol penelitian yang sistematis dan terstandar. Protokol ini mencakup kriteria seleksi sumber data, prosedur pengumpulan data, kerangka analisis, dan panduan interpretasi temuan. Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara detail untuk memungkinkan audit trail dan replikasi penelitian di masa mendatang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan interpretatif-kritis, di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan temuan-temuan dari literatur, tetapi juga melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi pola, keterkaitan, dan implikasi dari berbagai konsep dan praktik etika dalam konteks good governance. Proses analisis ini juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi implementasi etika dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Keterbatasan penelitian yang perlu diakui adalah tidak adanya data primer dari wawancara atau observasi langsung di lapangan. Namun, keterbatasan ini diatasi dengan melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap sumber-sumber sekunder yang tersedia, serta menggunakan berbagai perspektif teoretis untuk memperkaya pemahaman tentang topik yang diteliti. Peneliti juga memberikan perhatian khusus pada validitas dan reliabilitas sumber data yang digunakan, dengan memastikan bahwa sumber-sumber tersebut berasal dari institusi atau penulis yang kredibel dan diakui dalam bidangnya. Untuk memastikan objektivitas penelitian, peneliti menerapkan prinsip *reflexivity* dengan secara kritis mengevaluasi potensi bias dalam interpretasi data dan berupaya untuk menyajikan temuan penelitian secara berimbang dan komprehensif. Seluruh proses penelitian dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika penelitian, termasuk penghargaan terhadap hak cipta dan *proper citation* terhadap semua sumber yang digunakan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Dimensi Fundamental Etika dalam Good Governance**

Dimensi etika dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan fondasi fundamental yang menentukan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut penelitian komprehensif yang dilakukan oleh (Miswardi et al., 2021), etika pemerintahan tidak hanya mencakup aspek normatif tentang benar dan salah, tetapi juga meliputi sistem nilai dan prinsip moral yang menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan tindakan aparatur pemerintah. Konsep ini menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap kepentingan publik sebagai elemen inti dalam membangun tata kelola pemerintahan yang beretika. Prinsip dasar etika dalam pemerintahan meliputi beberapa aspek krusial yang saling terkoneksi. Pertama, prinsip integritas yang mengharuskan aparatur pemerintah untuk menjunjung tinggi kejujuran dan konsistensi antara nilai moral dengan tindakan. Kedua, prinsip profesionalisme yang menekankan kompetensi, objektivitas, dan dedikasi dalam pelayanan publik. Ketiga, prinsip akuntabilitas moral yang menuntut pertanggungjawaban tidak hanya secara administratif tetapi juga secara etis atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil.

Dalam konteks hubungannya dengan pilar *good governance*, etika memiliki peran strategis dalam memperkuat implementasi prinsip-prinsip fundamental tata kelola pemerintahan. Aspek transparansi, sebagai salah satu pilar utama, memiliki keterkaitan erat dengan etika keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan informasi publik. Sebagaimana

diungkapkan dalam studi (Rosidah et al., 2023), transparansi yang dilandasi etika tidak hanya sekedar membuka akses informasi, tetapi juga mencakup komitmen untuk menyajikan informasi secara akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas sebagai pilar kedua menjadi manifestasi konkret dari prinsip etika pertanggungjawaban. Dalam hal ini, etika berperan sebagai kompas moral yang mengarahkan aparatur pemerintah untuk tidak sekedar memenuhi kewajiban formal, tetapi juga membangun kesadaran untuk bertanggung jawab secara moral kepada publik.

Dimensi partisipasi, sebagai pilar ketiga, terkait erat dengan etika inklusivitas dan penghargaan terhadap aspirasi publik. Hal ini mengharuskan aparatur pemerintah untuk memfasilitasi dan menghargai keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pilar rule of law memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan etika keadilan dan kepatuhan hukum. Implementasi supremasi hukum yang dilandasi etika akan menghasilkan penegakan hukum yang tidak hanya legal secara formal tetapi juga legitimate secara moral. (Kholis & Fikriana, 2023) dalam penelitiannya menggarisbawahi bahwa efektivitas rule of law sangat ditentukan oleh integritas moral para penegak hukum dan aparatur pemerintah.

## 2. Implementasi Etika dalam Praktik Good Governance

Implementasi etika dalam praktik good governance direalisasikan melalui berbagai mekanisme dan instrumen yang sistematis dan terstruktur. Penerapan kode etik di institusi pemerintah menjadi langkah fundamental dalam membangun kerangka etika yang operasional. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memuat nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan standar etika yang harus dipatuhi oleh setiap aparatur pemerintah. Implementasi kode etik ini mencakup aspek preventif berupa sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai etika, serta aspek penegakan melalui mekanisme sanksi terhadap pelanggaran etika. Sistem pengendalian internal berbasis etika dikembangkan sebagai instrumen untuk memastikan internalisasi dan implementasi nilai-nilai etika dalam praktik sehari-hari. Sistem ini meliputi berbagai komponen yang saling terintegrasi, mulai dari assessment risiko etika, pengembangan prosedur operasional standar yang mengintegrasikan aspek etika, hingga monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi etika. Kajian yang dilakukan oleh (Usmar, 2021) menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal berbasis etika sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan partisipasi aktif seluruh aparatur dalam mengimplementasikan nilai-nilai etika.

## 3. Tantangan dan Hambatan Implementasi Etika

Implementasi etika dalam good governance menghadapi berbagai tantangan kompleks, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam konteks tantangan internal, budaya organisasi menjadi salah satu faktor krusial yang dapat menghambat atau mendukung implementasi etika. Menurut penelitian (Carolina & Mukti, 2020), resistensi terhadap perubahan dan kuatnya budaya paternalistik dalam birokrasi dapat menghambat internalisasi nilai-nilai etika modern yang menekankan profesionalisme dan akuntabilitas. Budaya organisasi yang cenderung hierarkis dan kaku seringkali menciptakan gap antara standar etika formal dengan praktik nyata di lapangan. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan tantangan internal lainnya yang signifikan. Keterbatasan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip etika sering kali menjadi bottleneck dalam mewujudkan good governance. (Rahmawati & Sulastri, 2023) mengidentifikasi bahwa kesenjangan kompetensi etis aparatur tidak hanya mencakup aspek kognitif tetapi juga kemampuan dalam menyelesaikan dilema etis yang kompleks dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dari perspektif eksternal, perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam implementasi etika good governance. Digitalisasi pelayanan publik dan transformasi digital pemerintahan memunculkan isu-isu etis yang semakin kompleks, seperti privasi data, keamanan informasi, dan transparansi algoritma. (Syafitri, 2020) menyoroti bahwa kecepatan perkembangan teknologi seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan kerangka etika yang adaptif dan responsif. Dinamika sosial politik juga memberikan tantangan tersendiri dalam implementasi etika.

#### 4. Strategi Penguatan Etika dalam Good Governance

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif untuk memperkuat implementasi etika dalam good governance. Pengembangan sistem dan regulasi menjadi langkah fundamental yang mencakup pembaruan kerangka hukum, penyempurnaan standar operasional prosedur, dan penguatan mekanisme penegakan etika. Sistem yang dikembangkan harus bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan dan mampu mengakomodasi kompleksitas tantangan kontemporer. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan melalui program pengembangan kompetensi yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya fokus pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga mencakup penguatan kesadaran etis dan kemampuan pengambilan keputusan yang beretika. (Nurdiah et al., 2024) menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran experiential dan studi kasus dalam mengembangkan kompetensi etis aparatur.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa etika memiliki peran fundamental dalam mewujudkan good governance melalui penguatan dimensi moral dan integritas dalam tata kelola pemerintahan. Implementasi etika yang efektif terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Tantangan implementasi etika, baik yang bersifat internal seperti budaya organisasi dan kapasitas SDM, maupun eksternal seperti perkembangan teknologi dan dinamika sosial politik, memerlukan pendekatan komprehensif dan strategis dalam penanganannya. Strategi penguatan etika dalam good governance harus mencakup aspek pengembangan sistem dan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan mekanisme pengawasan, serta pemberdayaan partisipasi publik. Keberhasilan implementasi etika dalam good governance sangat bergantung pada komitmen seluruh stakeholder dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para akademisi dan praktisi yang telah memberikan masukan berharga melalui karya-karya ilmiah mereka yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan dukungan dan masukan konstruktif selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada tim editor dan reviewer yang telah memberikan saran perbaikan yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan artikel ini.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Aushap, A., Naufal, M. L., Nurjaman, M., & Darmawan, I. (2023). Pengaruh Penerapan E-Government (SPBE) Melalui Penggunaan Aplikasi "Sakedap" Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Smart City (Studi Kasus di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung). *Socius: Jurnal ...*, 1(December), 233–243. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/82%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/82/76>
- Carolina, L. A., & Mukti, A. (2020). Budaya Birokrasi Paternalisme di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 4(1), 36.

- Kholis, N., & Fikriana, A. (2023). Pengaruh Etika Dan Moral Dalam Proses Hukum :Kasus Kolaborasi Richard Eliezer Dalam Kasus Pembunuhan Nofriansyah Yoswa. *Purnama Berazam*, 5(1), 88–97.
- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu*, 15(2), 150–162.
- Nastia, N. (2024). Transformasi Digital Melalui Inovasi E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Governance*, 12(2), 268–281. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9799>
- Nurdiah, R. F., Budiyanto, M., & Alima, S. A. (2024). Pembelajaran Aktif: Implementasi Pendekatan Experiential Learning Pada Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Hasil Belajar: Implementasi Pendekatan Experiential Learning Pada Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Materi Unsur Senyawa Campuran. *PENDIPA Journal of Science Education*, 8(2), 164–170.
- Nurnovianti, C., & Karniawati, N. (2024). Efektivitas Aplikasi E-Kelurahan di Kota Bandung. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 166–176.
- Pambudi, A. S. (2023). Permasalahan Pelayanan Publik Dan Peran Ombudsman Perwakilan Dalam Pendampingan Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(2), 128–141. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i2.3178>
- Rahmarta, V., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). Kekuatan Organisasional Dan Sistem Dalam Pencegahan Fraud: Suatu Tinjauan System Literature Review. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 8(1), 28–43. <https://doi.org/>
- Rahmawati, A., & Sulastri, S. (2023). Dilema Etika Dalam Praktik Organisasi Pelayanan Manusia Non-Profit Ethical Dilemmas in the Practice of Non-Profit Human. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(3), 125–130.
- Ramadhan, I., Hadist, N., & Kurniati, K. (2024). Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 15–22. <https://doi.org/10.61292/eljbn.209>
- Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Syafitri, E. (2020). PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENERAPAN PROJECT-BASED PRACTICE BERLUARAN INFOGRAFIS PADA PERKULIAHAN EMBRIOLOGI

TUMBUHAN. RESWARA: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).  
<https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.731>

Usmar. (2021). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (Survei Pada Pemda DKI Jakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 50. <https://ejournal-ibik57.ac.id/index.php/jabisi/article/view/219/150>

Wahyu, D. (2024). Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Papua. *Yustitiabelen*, 10(1), 36–61. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.922>